



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI**

**(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 31 (tiga puluh satu)
Jenis Rapat	:	<b>Rapat Dengar Pendapat</b>
Dengan	:	1. Dirjen PP, Kementerian Hukum 2. Dirjen OTDA, Kementerian Dalam Negeri 3. Ketua Komnas Perempuan dan <b>Rapat Dengar Pendapat Umum</b> Dengan Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (FSPBI)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 30 September 2025
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	Pembahasan terkait Regulasi Yang Diskriminatif Terhadap Perempuan
Ketua Rapat	:	Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI/Fraksi Partai Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si

Hadir	:	14 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Izin 28 Anggota Komisi XIII DPR RI
		1. Dirjen PP Kementerian Hukum, <b>Dhahana Putra</b> 2. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, <b>Akmal Malik</b> 3. Ketua Komnas Perempuan, <b>Maria Ulfah Anshor</b> 4. Pengurus Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia

## I. PENDAHULUAN

**Rapat Dengar Pendapat** Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan - Kementerian Hukum, Dirjen Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komnas Perempuan, dan **Rapat Dengar Pendapat Umum** dengan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia, pada Selasa, 30 September 2025 dengan agenda “Membahas Regulasi Yang Diskriminatif Terhadap Perempuan” dibuka pada pukul 14.00 WIB, dan dipimpin oleh **Willy Aditya**, Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI mendukung Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang melibatkan Kementerian Hukum RI, Kementerian HAM RI dan Komnas Perempuan untuk melakukan fasilitasi, klarifikasi dan evaluasi bagi peraturan daerah yang berpihak bagi perlindungan yang berbasis Hak Asasi Manusia.
2. Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum RI dan Kementerian HAM RI dan kementerian teknis terkait serta Komnas Perempuan melakukan *best practice* di sektor transportasi publik sebagai *pilot project*.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB

**DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM**

**KETUA RAPAT,**

TTD

TTD

**DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., SH., M.Si.**

**WILLY ADITYA**  
**A-404**

DIRJEN OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KETUA KOMNAS PEREMPUAN

TTD

TTD

AKMAL MALIK

MARIA ULFAH ANSHOR